

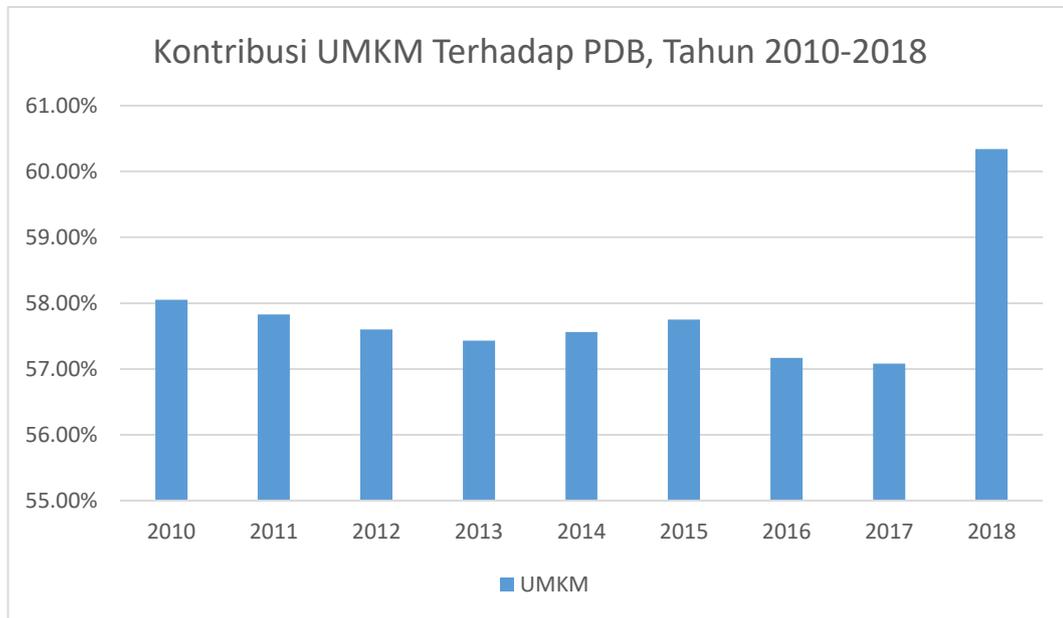
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia pada awal tahun 1997 sampai dengan 1998 diawali dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Ketika krisis ekonomi mulai menerpa dunia maka keadaan perekonomian Indonesia pun semakin memburuk dan hanya sektor UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi (Arief Rahmana, 2008). Data Badan Pusat Statistik melalui penelitiannya menyatakan bahwa pasca krisis ekonomi yang terjadi jumlah UMKM di Indonesia tidak berkurang, justru meningkat bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pengusaha di Indonesia diketahui sebanyak 56.539.560, dan dari jumlah tersebut UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau hamper sebesar 99,99% dan usaha besar hanya sekitar 0,01% sebanyak 4.968 (Suci et al., 2017). UMKM mempunyai peran dalam perekonomian negara yang dapat bergerak dalam ekonomi regional. Menurut diagram dibawah menyatakan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB yang signifikan setiap tahunnya serta mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 2018:

Grafik 1. 1
Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2018



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2019.

Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan tentunya. Dengan meningkatkan peran UMKM di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi positif yang signifikan dalam upaya-upaya mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, distribusi pembangunan dan pendapatan masyarakat yang belum merata dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi kreatif mendorong usaha mikro dan kecil terus berkembang khususnya di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan penyediaan fasilitas pendukung. Kontribusi usaha mikro dan kecil di Kota Bandung dalam laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sangat besar. Perkembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya dan membuat sektor industri yang membuat perkembangan ekonomi semakin maju.

Primaderi Ikmi Haqulyaqin, 2020

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM di Kota Bandung Tahun 2010-2017

No	Uraian	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1									
2	MIKRO	3,649	3,827	3,921	4,115	4,301	4,578	4689	5099
3	KECIL	301	325	337	357	372	392	395	411
	JUMLAH	3950	4,152	4246	4472	4673	4970	5084	5510

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, 2018

Melihat banyaknya peluang usaha kreatif yang terdapat di daerah Bandung, tidaklah heran bila Kota Bandung menjadi gudangnya para pembisnis kreatif dan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang ikut serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat nasional (BisnisUKM, 2012). Menurut Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, Kota Bandung memiliki 6141 UMKM hal tersebut menyatakan bahwa semakin tahun pelaku UMKM meningkat. Pelaku usaha kecil dan menengah menjadi peran utama dalam menjalankan bisnis dari waktu ke waktu yang berperan sebagai roda yang dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha kecil dan menengah sebagai pengelola. Keberlangsungan bisnis usaha kecil dan menengah akan menjadi meningkat apabila pengelola dapat bersaing dengan bisnis-bisnis yang sudah berlangsung cukup lama di regionalnya. Usaha kecil dan menengah telah lama dipahami memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Audretsch et al., 2009; Carter & Jones-Evanss, 2006). Secara spesifik, keberadaan UMKM dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja (Carrer & Klomp, 1996; Adomako et al., 2015).

Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan kinerja UMKM bukan hal yang mudah. Orser et al., (2000) mengatakan bahwa permasalahan bidang manajemen dalam pemasaran, keuangan, teknologi sangat berpengaruh terhadap pengembangan kinerja UMKM. Kelemahan UMKM di Indonesia adalah pada aspek daya saing, baik daya saing harga maupun differensiasi, hal ini disebabkan latar belakang UMKM di kota Bandung masih mengandalkan manajemen keluarga dalam pengembangan bisnis modelnya. Kondisi inilah yang menyebabkan pola pengelolaan UMKM masih sangat tradisional dan

mengandalkan hubungan kekerabatan. Untuk menjadi UMKM yang kompeten, maka harus diubah pola pengembangan UMKM dari tradisional ke profesional (melengkapi dengan aspek legal dan memanfaatkan teknologi), dari mengandalkan evaluasi kinerja secara konvensional, diubah menjadi penilaian kinerja berbasis Teknologi Informasi.

Kinerja yang efektif dan efisien menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Dharma (2005:231) nilai-nilai dasar yang fundamental bagi keberhasilan perusahaan dapat diketahui melalui sumber daya manusia, produk, dan laba. Kinerja keuangan pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mengukur kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan.

Data Bank Indonesia tahun 2011-2012, menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 55 juta UMKM (Bank Indonesia dan LPPI, 2015). Para pelaku usaha masih rendah dalam memanfaatkan layanan perbankan dalam mengembangkan usaha miliknya. Hal ini menunjukkan hanya sekitar 8 juta UMKM yang telah menggunakan produk perbankan. Rendahnya tingkat literasi keuangan pada UMKM berdampak terhadap penyerapan kredit oleh sektor perbankan.

Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan S.Munawir (2010). Laporan keuangan juga harus menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2008).

Pentingnya laporan keuangan disuatu perusahaan adalah untuk menjadi dasar dalam menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan karena fungsi laporan keuangan yaitu sebagai alat komunikasi antara pihak internal dan eksternal (Toha & Harahap, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan agar laporan keuangan dapat menjadi alat komunikasi yang baik antara pihak internal dan eksternal, karena laporan keuangan yang berkualitas

dapat menyajikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan (Mutasowifin, 2008).

Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan pentingnya literasi keuangan bagi usahanya. Hal ini menjadi penting karena UMKM saat ini menjadi tulang punggung terutama di negara ASEAN yakni menyerap tenaga kerja dan investasi asing. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Agustus 2014, bahwa penyaluran kredit untuk UMKM baru sebesar 18% dari total kredit hanya Rp635 Triliun dari total kredit Rp3.500 Triliun Wicaksono (2014). Menurut pihak Otoritas Jasa Keuangan nilai tersebut sangat sedikit jika dibandingkan jumlah pelaku usaha UMKM. Tingkat literasi keuangan pada kelompok UMKM hanya sebesar 15,68% hasil survey yang dilakukan oleh (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).

Fatoki & Odeyemi (2010) menjelaskan bahwa kemampuan manajerial mempengaruhi perencanaan bisnis usaha dan kemampuan untuk memperoleh sumber pendanaan bagi usaha mereka. Namun yang sangat banyak terjadi di lapangan masalah permodalan adalah alasan klise banyak UMKM tidak berkembang. Tidak semua golongan masyarakat, khususnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang sangat produktif untuk terus dikembangkan demi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia. Secara umum, UMKM sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan pertumbuhan UMKM. Salah satunya dengan cara memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan keuangan usaha dapat berkembang dengan baik (Aribawa, 2016). Dahmen & Rodríguez (2014) juga menyatakan bahwa diperlukan pemahaman tingkat literasi keuangan bagi pelaku usaha terutama untuk penyusunan laporan keuangan usahanya guna untuk dilakukan mencari pendanaan. Lebih jauh, pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus. Sehingga memungkinkan UMKM mengalami pertumbuhan bisnis. Anggraeni (2016)

Primaderi Ikmi Haqulyaqin, 2020

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
UMKM DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyatakan literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha.

Tingginya *unbanked people* di Indonesia menurut survei yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2015 dapat dilihat dari dua sisi yaitu permintaan dan penawaran, di mana dari sisi penawaran terdapat beberapa faktor yang menghambat layanan keuangan untuk masyarakat antara lain adanya informasi asimetris yang menyebabkan institusi keuangan terlalu selektif dalam memilih nasabah, pendirian kantor cabang yang cenderung mahal, persepsi terhadap ibu rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah sehingga tidak mempunyai akses terhadap jasa keuangan, proses pendirian yang terbentur birokrasi, formalitas yang tinggi dan masalah yang kompleks, pandangan terhadap nasabah yang grassroots dianggap tidak profitable, perlunya dukungan dari sistem IT seperti memperluas jaringan komunikasi (Sanistasya et al., 2019). Masalah – masalah tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan tidak akan muncul dengan sendirinya.

Hal ini dikarenakan literasi keuangan memfasilitasi penggunaan produk secara efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan dan produk keuangan terbaik sesuai dengan kebutuhan, kondisi tersebut sebagai syarat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mendapatkan akses berbagai produk dan jasa keuangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan (Riwayati, 2013). Inklusi keuangan mampu melakukan perubahan dalam pola berpikir para pelaku ekonomi dalam melihat uang dan keuntungan (Agarwal, 2016). Literasi keuangan menjadi isu yang menarik baik di negara maju maupun negara berkembang dan telah memunculkan perubahan yang cepat dalam industri keuangan (Wachira & Kihui, 2012). Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang memengaruhi kesejahteraannya (Lusardi, 2008). Pemahaman mengenai konsep-konsep dasar keuangan yang baik maka ketika membuat keputusan tentang keuangan tidak mengalami masalah di

masa depan sehingga mampu menunjukkan perilaku keuangan yang sehat untuk menentukan prioritas kebutuhan bukan hanya sekedar keinginan

Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak mampu mengikuti inklusi keuangan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang mengakses dan mampu menggunakan layanan keuangan namun tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap layanan tersebut. Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 menargetkan pencapaian indeks inklusi keuangan 75 persen ditahun 2019. Selain itu inklusi keuangan juga menjadi perhatian pemerintah sebab peran inklusi keuangan nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat hambatan dalam mengakses lembaga keuangan yang unbankble (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan, rendahnya pembiayaan UMKM, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen UMKM dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Menurut Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela Batunaggar mengatakan bahwa inklusi keuangan masih tergolong rendah hanya 60 persen penduduk dewasa yang memiliki rekening bank, terlebih lagi jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak (Herdi Alif Al Hikam, 2019). Tingginya masyarakat yang tidak mendapatkan layanan jasa keuangan di Indonesia menurut survey yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2015 dapat dilihat dari dua sisi yaitu permintaan dan penawaran, dimana dari sisi penawaran terdapat beberapa faktor yang menghambat layanan keuangan untuk masyarakat antara lain adanya informasi asimetris yang menyebabkan institusi keuangan terlalu selektif dalam memilih nasabah, pendirian kantor cabang yang cenderung mahal, persepsi terhadap ibu rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah sehingga tidak mempunyai akses terhadap jasa keuangan, proses pendirian yang berbentur birokrasi, formalitas yang tinggi dan masalah yang kompleks, pandangan terhadap nasabah golongan rendah yang dianggap tidak menguntungkan, perlunya dukungan dari sistem IT seperti memperluas jaringan komunikasi (Sanistasya et al., 2019).

Oleh karena itu literasi keuangan dan inklusi sangat penting untuk menunjang dalam keputusan perusahaan yang sejalan dengan penelitian Kasendah & Wijayangka (2019) yang mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian (Aribawa, 2016) literasi keuangan yang baik diharapkan UMKM akan mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha dan sesuai dengan penelitian Literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha (Anggraeni, 2016) sesuai juga dengan penelitian (Wulandari, 2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja UMKM.

Dengan melihat latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan usaha mikro dan kecil di Kota Bandung, melihat hal ini menjadi urgensi bagi perusahaan untuk mampu bersaing di masa yang akan datang, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “**Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung**”.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang dan judul di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Dapat memperkaya konsep dan teori, khususnya pengetahuan mengenai “pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung”
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dunia Pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap UMKM dalam rangka untuk meningkatkan kinerja UMKM dengan kesadaran literasi keuangan.